



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRATMAN ANDI AGTAS
2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI
3. NHK : 180200

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.328.248.326

1. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m²/145 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.334.581.248
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 59.097.292
3. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m²/30 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.283.811.760
4. Tanah Seluas 170 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 23.417.760
5. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m²/30 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.283.811.760
6. Tanah Seluas 136 m² di KAB / KOTA TOLITOLI, HASIL SENDIRI Rp. 95.054.400
7. Tanah Seluas 103 m² di KAB / KOTA TOLITOLI, HASIL SENDIRI Rp. 82.656.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/39 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.207.715.548
9. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/39 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.207.715.548
10. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m²/300 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.016.000.000
11. Tanah Seluas 773 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 734.387.010



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	425.680.000
1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD S 2.4 AT / MICRO/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA INOVA VENTURER2-4AT/MOBIL PENUMPANG /MICRO MINI BUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 255.680.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	11.498.855.593
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.132.056.180
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	23.384.840.099
III. HUTANG	Rp.	485.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	22.899.840.099

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.